

Ratifikasi Paket Bali Oleh India Dalam Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (WTO) 2013

(Ratification of the Bali Package by India at the World Trade Organization (WTO) Ministerial Conference in 2013)

Citra Dyah Kumala Yogi

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto, Jember 68121

E-mail: citradyahkumalayogi@gmail.com

Abstract

Food security is one of issues which gain the eyes of the international world, particularly in the poor and developing countries, one of which is India. India is the second most populous country behind China. In India, a large portion of its people has lived in hunger and under the poverty line. This makes the government need to get the extra work to meet the people's demand of food. The need of food of Indian people has been fulfilled from its agricultural production. It means that, the agricultural industry in India has a definitive impact to India. In the 9th World Trade Organization Ministerial Conference in Bali, India required WTO to increase the agricultural subsidy from 10% to 15% from the total outcome of the production. However, before the requirement was agreed, there was a deadlock between the developing and developed countries. Developed countries wished to erase the agricultural subsidy, while developing countries demand to increase it. The Ministerial Conference of WTO has formulated an agreement which is mentioned by the Bali Package. Deadlock happened because India threatened not to ratify or agree to the Bali Package if the agricultural subsidy was not increased. After lobbying between developed and developing countries, an agreement emerged, that is, to increase the agricultural subsidy from 10% to 15%. Afterward, India agreed to ratify the Bali Package.

Keywords: WTO, bali package, food security, agriculture subsidy, India.

Pendahuluan

Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organization/WTO*) merupakan organisasi yang mengatur tentang berjalannya perdagangan lintas negara, serta mengatur juga beberapa peraturan (seperti peraturan pemberian subsidi dalam negeri) yang harus dipatuhi oleh semua anggotanya. Setiap dua tahun sekali seluruh

anggota WTO mengadakan pertemuan yang biasa disebut dengan Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*). Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ini merupakan salah satu pertemuan yang menjadi pokok dalam setiap pengambilan keputusan WTO. (WTO, Tanpa tahun).

Konferensi Tingkat Menteri WTO yang ke-9

diselenggarakan di Bali, Indonesia, diadakan pada tanggal 3-7 Desember 2013. Konferensi Tingkat Menteri WTO di Bali ini menghasilkan sebuah kesepakatan yang biasa disebut dengan Paket Bali (*Bali Package*). Kesepakatan Paket Bali ini berisi tiga kesepakatan, yaitu yang berkaitan dengan fasilitas perdagangan (*trade facility*), pasokan pangan (*food stockholding*), dan pembangunan negara kurang berkembang (*Least Developed Countries/LDCs*). (WTO, tanpa tahun). Namun, sebelum kesepakatan Paket Bali tersebut disetujui, sempat terjadi *deadlock*, sehingga KTM di Bali diperpanjang hingga tanggal 7 Desember 2015.

Deadlock tersebut terjadi karena, dalam KTM tersebut, India menginginkan supaya subsidi untuk pertanian dinaikkan dari 10% menjadi 15% dari total produksi nasional. Hal ini dilakukan karena sebagian besar masyarakat India bermatapencaharian sebagai petani. Petani di India sebagian besar masih berada di bawah garis miskin, oleh karena itu para petani di India membutuhkan bantuan dari pemerintah berupa subsidi pertanian. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat India yang sebagian besar juga dipenuhi dari hasil pertanian. Sehingga apabila permintaan India tersebut tidak dipenuhi, maka India mengancam tidak akan meratifikasi Paket Bali tersebut.

India merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Selatan dengan jumlah penduduk lebih dari 1,2 miliar.(GS, Tanpa tahun). Pertanian di India merupakan salah satu mata pencaharian terbesar masyarakatnya yang

didukung dengan areal pertanian yang luas. Kondisi ini berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Peningkatan produksi pertanian akan mempengaruhi ketahanan pangan (*food security*). (Pemerintah India, Tanpa tahun).

Salah satu komponen penting dari Paket Bali yang akan memutuskan hasil dari KTM WTO di Bali adalah usulan India tentang pasokan pangan (*food stockholding*) untuk tujuan ketahanan pangan (*food security*). Dengan mengatasnamakan G-33 India mengajukan proposal yang bertujuan untuk memperluas ruang kebijakan dengan mengubah Perjanjian Pertanian (*Agreement on Agriculture-AoA*) dalam rangka untuk memenuhi keamanan pangan India yang memiliki populasi besar.(Tim Redaksi, 2003).

Proposal India ini menyatakan kemajuan yang signifikan telah dicapai dalam perundingan Putaran Doha (*Doha Round*) yang mengakui adanya keprihatinan serius terhadap ketahanan pangan di negara-negara berkembang. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang saat ini menjadi perhatian khusus dalam dunia global dan segera membutuhkan tindakan. Hal ini juga termuat dalam proposal yang diajukan oleh India yang menginginkan perubahan dalam Revisi Draf Modalitas Untuk Teks Pertanian (TN/AG/W/4/Rev.4) tanggal 6 Desember 2008 yang berkaitan dengan keamanan pangan yang akan dibahas dalam pertemuan para menteri di Bali sesuai dengan ayat 47 dari Deklarasi Kementrian Doha (*Doha Ministerial Declaration-DMD*). India menginginkan penghapusan kalimat

terakhir pada catatan kaki no.5 ayat 3 dari AoA lampiran 2 pada pasokan pangan umum untuk tujuan ketahanan pangan. (Focus Web, Tanpa tahun).

Menekankan bahwa ketahanan pangan adalah hak yang berdaulat, India berharap bahwa anggota WTO memahami posisi India dan dalam KTM WTO di Bali memberikan solusi pada isu-isu tentang pasokan makanan. Menteri Perdagangan dan Industri India Anand Sharma juga menyatakan bahwa India menginginkan WTO untuk mengatasi dan mendapatkan solusi permanen tentang saham bahan makanan. Hal ini dianggap penting untuk keamanan pangan nasional India. Hal ini membuat penulis tertarik untuk membahas peristiwa ini lebih lanjut, karena pada awal pertemuan KTM WTO ke-9 tersebut, India tidak bersedia meratifikasi Paket Bali. Namun, pada hari terakhir akhirnya India bersedia meratifikasi Paket Bali tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini akan meneliti tentang alasan India meratifikasi Paket Bali.

Kerangka Pemikiran

Tulisan ini menggunakan dua konsep pemikiran, yaitu *Decision Making Approach* menurut J.N. Rosenau dan *Food Security Approach*. *Decision making approach* yang disampaikan oleh Rosenau mencoba untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri berdasarkan tingkatan variabel yang dianggap paling mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Kaitannya dengan kasus India ini, tingkatan variabelnya adalah peranan, masyarakat, pemerintah, sistem,

dan indiosinkrasi. (Hara, 2011:90).

Tingkatan pertama yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Pemerintah India adalah peranan. Peranan di sini berarti peranan-peranan yang ditempati oleh para pembuat keputusan yang harus dilakukan, tidak memperdulikan faktor indiosinkrasi. Tingkatan kedua yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Pemerintah India adalah variabel masyarakat. Rosenau tidak menjelaskan secara spesifik pengertian dari variabel masyarakat, namun Rosenau memberikan contoh aspek dalam variabel masyarakat, antara lain nilai dominan di masyarakat, tingkat kesatuan nasional, tingkat industrialisasi dan sistem ekonomi yang sedikit banyak menyumbang pada isi dari aspirasi dan kebijakan luar negeri suatu negara. Tingkatan ketiga yang dianggap mempengaruhi kebijakan luar negeri India adalah variabel pemerintah. Hal ini berkaitan dengan struktur pemerintahan yang bisa membatasi ataupun meningkatkan pilihan-pilihan yang dibuat oleh para pembuat keputusan. Tingkatan keempat yang memiliki pengaruh dalam kebijakan luar negeri India adalah variabel sistem. Variabel sistem ini meliputi aspek-aspek *non-human* di lingkungan eksternal suatu masyarakat atau tindakan-tindakan yang terjadi di luar negeri yang mengkondisikan atau mempengaruhi pilihan yang dibuat oleh para pembuat keputusan. Tingkatan terakhir yang mempengaruhi kebijakan luar negeri India adalah variabel indiosinkrasi. Indiosinkrasi yang kemudian juga disebut sebagai faktor individual dapat diartikan sebagai sifat yang unik

dan spesial dari seorang pemimpin yang menentukan dan menerapkan kebijakan luar negeri. Jadi, variabel individual berkaitan dengan keunikan sikap pembuat keputusan yang berbeda dengan orang lain. Variabel indosinkronisasi meliputi semua aspek yang ada pada para pembuat keputusan seperti nilai-nilai, keahlian, dan pengalamannya yang membedakan dengan para pembuat keputusan yang lain. (Hara, 2011:90)

Kerangka pemikiran kedua yang penulis gunakan adalah, *Food Security Approach*. *Food Security Approach* merupakan salah satu bagian dari variabel keamanan manusia. Variabel keamanan manusia sendiri, terdiri dari 7 variabel lainnya, yaitu keamanan ekonomi, keamanan individu, keamanan lingkungan, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan politik, dan keamanan komunitas. Dari 7 variabel tersebut, variabel keamanan pangan dianggap paling tepat digunakan untuk menganalisa bagaimana keamanan pangan di India yang menjadi alasan India bersedia meratifikasi Paket Bali.

Keamanan pangan (*food security*) merupakan konsep multi segi dengan beragam definisi dan interpretasi. Di satu sisi spektrum keamanan pangan menyiratkan ketersediaan pasokan pangan yang memadai di tingkat global dan nasional, di sisi lain ada kekhawatiran tentang gizi yang cukup dan kesejahteraan. (FAO, Tanpa Tahun). Kerawanan pangan dapat menyebabkan kemampuan kognitif yang lebih rendah, berkurang prestasi kerja, dan substansial kerugian

produktivitas. Semua ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional.

Keamanan pangan berarti ketika semua orang setiap saat memiliki akses fisik, ekonomi, sosial yang cukup aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Menurut FAO ada tiga kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi ketahanan pangan, yaitu: (FAO, 2008:1).

1. Ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan dengan tujuan “pasokan pangan” ditentukan dari tingkat produksi pangan, tingkat persediaan pangan, dan jumlah perdagangan bersih.
2. Akses fisik dan ekonomi terhadap makanan. Pasokan pangan yang cukup di tingkat nasional dan internasional tidak menjamin ketahanan pangan ditingkat rumah tangga. Kekhawatiran tentang akses pangan yang tidak cukup telah mengakibatkan fokus kebijakan lebih besar pada pendapatan, pengeluaran, pasar, dan harga dalam mencapai tujuan ketahanan pangan .
3. Kecukupan nutrisi (*food utilization*) . Pemanfaatan umumnya dipahami sebagai cara tubuh mengolah makanan menjadi energi. Energi dan asupan nutrisi yang cukup adalah hasil dari perawatan yang baik, persiapan makanan yang baik, dan distribusi makanan yang baik.

Kedua konsep tersebut yang akan digunakan untuk menganalisa alasan India bersedia meratifikasi Paket Bali.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini data diperoleh dari

penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh merupakan data sekunder karena penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tidak langsung. Sehingga data yang diperoleh berupa data tertulis yang bersumber pada buku, artikel, majalah, surat kabar, internet, dan sumber tertulis lainnya.

Metode analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, akurat atas data dan fakta yang telah terkumpul untuk diteliti dengan dilakukan pemilihan data pengkajian dan interpretasi terlebih dahulu. Kemudian untuk menganalisis data dan permasalahan yang ada penulis menggunakan teknik berpikir deduktif. Deduktif merupakan teknik berpikir dari hal-hal yang bersifat umum berupa data dan fakta yang telah terkumpul kemudian didapatkan hasil yang bersifat khusus berupa kesimpulan.

Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini ada dua, yaitu kebijakan luar negeri India yang dianalisa menggunakan *Decision Making Approach* menurut James N. Rosenau. Berdasarkan teori Rosenau, India berada dalam kategori negara besar yang sedang berkembang. Jadi tingkatan variabel yang mempengaruhi adalah peranan (*role*), masyarakat, pemerintah, sistem, dan indiosinkrasi. Tingkatan variabel yang mempengaruhi kebijakan luar negeri India adalah:

1. Peranan (*role*). Peranan di sini berarti peranan-peranan yang ditempati oleh para

pembuatan keputusan yang harus dilakukan, tidak memperdulikan faktor indiosinkrasi. Kaitannya dengan India adalah, peranan ini dipegang oleh Menteri Perdagangan dan Industri India saat itu, yaitu Anand Sharma. Anand Sharma menjadi Menteri Perdagangan dan Industri India sejak 22 Mei 2009. Sebagai Menteri Perdagangan tentu Anand Sharma mempunyai kewajiban untuk mengedepankan kepentingan negaranya, di mana pada saat itu kepentingan India adalah meminta WTO untuk menaikkan subsidi pertanian dari 10% menjadi 15% dari total produksi nasional. Selain itu, dalam kaitannya dengan proposal yang diajukan oleh India yang mengatasnamakan G33, India berperan sebagai negara yang mewakili negara-negara berkembang untuk mendesak WTO meningkatkan subsidi dari 10% menjadi 15%. Sehingga peranan India di sini sangat diperhitungkan sebagai negara yang menyuarakan kepentingan negara berkembang lainnya.

2. Tingkatan kedua yang mempengaruhi kebijakan luar negeri India adalah masyarakat. Aspek dalam variabel masyarakat, antara lain nilai dominan di masyarakat, tingkat kesatuan nasional, tingkat industrialisasi dan sistem ekonomi yang sedikit menyumbang pada isi dari aspirasi dan kebijakan luar negeri suatu negara. (Hara, 2011:90). Keberagaman budaya yang dimiliki oleh India dan jumlah penduduk yang banyak, terkadang menimbulkan berbagai masalah, mulai dari masalah sosial, ekonomi, pendidikan, hingga lingkungan. Kaitannya dengan keputusan India dalam meratifikasi Paket Bali adalah kondisi

masyarakat India (khususnya petani) masih sangat membutuhkan subsidi dalam bidang pertanian. Subsidi tersebut akan sangat mempengaruhi produksi dari pertanian India, karena subsidi tersebut akan membantu petani-petani miskin di India untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam bidang pertanian. Para petani di India tidak bisa memenuhi semua kebutuhan mereka dalam bidang pertanian, karena petani di India masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Para serikat petani di India meminta pemerintah untuk segera mengatasi permasalahan ketahanan pangan. Serikat petani India mendesak pemerintah untuk mengajukan subsidi pertanian dinaikkan dari 10% menjadi 15% dari total produksi. Permintaan serikat petani ini disampaikan langsung melalui surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Manmohan Singh. Serikat petani di India memiliki pengaruh yang cukup berpengaruh terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, terutama dalam kebijakan dalam bidang pertanian. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar masyarakat India yang bermatapencarian sebagai petani, serta kebutuhan pangan mereka dipenuhi dari hasil produksi pertanian.

3. Tingkatan ketiga yang mempengaruhi kebijakan luar negeri India adalah pemerintah. Hal ini berkaitan dengan struktur pemerintahan yang bisa membatasi ataupun meningkatkan pilihan-pilihan yang dibuat oleh para pembuat keputusan. (Hara, 2011:90). Struktur pemerintahan India terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Struktur pemerintahan tersebut bisa menjadi variabel yang

mempengaruhi kebijakan luar negeri India. Di mana pemerintah India pasti memiliki pertimbangan berdasarkan kondisi/kebutuhan masyarakat pada saat membuat keputusan.

4. Tingkatan keempat yang mempengaruhi kebijakan luar negeri India adalah sistem. Variabel sistem ini meliputi aspek-aspek *non-human* dilingkungan eksternal suatu masyarakat atau tindakan-tindakan yang terjadi di luar negeri yang mengkondisikan atau mempengaruhi pilihan yang dibuat oleh para pembuat keputusan. (Hara, 2011:90). Dalam kaitannya dengan kasus di India ini adalah isu ketahanan pangan sudah menjadi isu yang mendapat banyak perhatian dunia internasional. Ketahanan pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Ditambah lagi dengan jumlah penduduk kelaparan di India yang masih cukup tinggi tentu harus segera ditangani, apabila kelaparan yang terjadi di India tidak segera mendapatkan penanganan, maka bukan tidak mungkin jika India akan mendapat protes keras dari dunia internasional dan dianggap sebagai negara yang tidak layak huni, karena tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya, yaitu kebutuhan pangan.

5. Tingkatan terakhir yang mempengaruhi kebijakan luar negeri India adalah indiosinkrasi. Variabel indiosinkrasi ini biasa disebut dengan faktor individu. Jadi, variabel individual berkaitan dengan keunikan sikap pembuat keputusan yang berbeda dengan orang lain. Variabel indiosinkrasi meliputi semua aspek yang ada pada para pembuat keputusan seperti nilai-nilai, keahlian, dan

pengalamannya yang membedakan dengan para pembuat keputusan yang lain. (Hara, 2011:90). Kaitannya dengan keputusan India dalam meratifikasi Paket Bali yang pada saat itu diwakili oleh Anand Sharma, membuat keputusan berdasarkan kondisi masyarakat India. Anand Sharma sebagai seorang Menteri Perdagangan dan Industri mempunyai pengalaman sebagai pengacara, dan juga pernah menjadi Menteri Luar Negeri India pada tahun 1985-1988. (Pemerintah India, Tanpa Tahun). Dari pengalaman-pengalaman tersebut Anand Sharma tentu mengerti bagaimana harus membuat keputusan yang benar dan tepat dalam meratifikasi Paket Bali dalam KTM WTO di Bali tahun 2013.

Hasil penelitian yang kedua adalah alasan India bersedia meratifikasi Paket Bali adalah terkait dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah ketika semua orang setiap saat memiliki akses fisik, ekonomi dan sosial terhadap makanan yang cukup aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. FAO menyebutkan ada 3 kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses fisik dan ekonomi terhadap makanan, dan kecukupan gizi (*food utilization*).

1. Ketersediaan pangan sangat erat kaitannya dengan hasil produksi pertanian. Ketersediaan pangan ini berkaitan dengan produksi dan distribusi makanan. Jumlah populasi yang besar di India membuat hasil produksi pertanian di India tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan

masyarakat India. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya impor pangan yang dilakukan oleh India untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Impor makanan yang dilakukan oleh India adalah impor makanan pokok masyarakat India seperti gandum, sereal, dan beras. Mulai dari tahun 2001-2013, impor dari gandum, sereal dan beras mengalami ketidakstabilan. (FAO, Tanpa tahun). Oleh karena ketidakstabilan ini maka wajar apabila India masih membutuhkan subsidi pertanian. Hal ini dilakukan supaya produksi pertanian dalam negeri stabil dan India bisa mandiri dalam produksi pertaniannya.

Selain dipengaruhi oleh produksi pertanian, ketahanan pangan juga di pengaruhi oleh distribusi pangan. India sendiri memiliki sistem distribusi sendiri, yang biasa disebut dengan Sistem Distribusi Umum (*Public Distribution System/PDS*). PDS berkembang sebagai sistem manajemen kelangkaan dan distribusi bahan pangan dengan harga terjangkau. PDS juga telah menjadi bagian penting dari Pemerintah India untuk pengelolaan ekonomi pangan dalam negeri. PDS ini bekerja dan diawasi langsung oleh Pusat dan Pemerintah Negara. Pemerintah pusat melalui *Food Corporation of India* (FCI), telah mengambil tanggung jawab untuk pengadaan, penyimpanan, dan alokasi sebagian besar bahan pangan kepada pemerintah negara. Tanggung jawab operasional termasuk alokasi dalam negara, mengidentifikasi keluarga yang memenuhi syarat, dan pengawasan fungsi *Fair Price Shops* (FPSs). Komoditas yang berada di bawah pengawasan

PDS saat ini adalah gandum, beras, gula, dan minyak tanah. (DFPDI, Tanpa tahun). Keberadaan PDS ini diharapkan akan memperbaiki sistem distribusi di India. Distribusi pangan di India belum bisa mencakup semua kalangan masyarakat, yang dibuktikan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang kelaparan dan kekurangan gizi. Jika distribusi pangan sudah merata, maka kebutuhan pangan masyarakat India juga akan terpenuhi.

2. Akses fisik dan ekonomi terhadap makanan. Akses pangan ini mengacu pada pasokan pangan di tingkat nasional. Selain itu akses pangan juga mengacu pada kemampuan untuk membeli pangan dan besarnya alokasi pangan. Akses pangan sangat ditentukan dari faktor pendapatan, harga makanan, dan kemampuan rumah tangga/individu untuk mendapatkan akses secara fisik maupun ekonomi terhadap pangan. (FAO, 2013:78).

India telah berhasil mengurangi jumlah kemiskinan sebesar 54,9% dari total populasi pada tahun 1973 menjadi 30% pada tahun 2009, namun lebih dari 350 juta orang tetap berada di bawah garis kemiskinan. Laporan dari *Planning Commission's Eleventh Five Year Plan* menyatakan bahwa jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan adalah 301.700.000 pada tahun 2004. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2009-2010 sebesar 354 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. (NCAER, Tanpa tahun). Jumlah penduduk miskin di India tersebut menunjukkan bahwa pendapatan

masyarakat India masih berada di bawah rata-rata .

Pendapatan masyarakat India yang masih berada di bawah rata-rata dikarenakan oleh kurangnya lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan juga mengakibatkan jumlah penduduk miskin akan semakin meningkat jika tidak ada penanganan serius dari pemerintah. Kemiskinan yang meningkat tentu saja akan mempengaruhi masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu, wajar apabila Pemerintah India meminta WTO untuk menaikkan subsidi untuk bidang pertanian dari 10% menjadi 15%. Karena sebagian besar penduduk India bekerja dibidang pertanian. Oleh karena itu pemerintah India masih sangat membutuhkan subsidi untuk pertanian dalam rangka menambah lahan untuk pertanian dan mengurangi jumlah penduduk miskin di India.

3. Kecukupan nutrisi (*food utilization*). Kriteria ketiga yang menjadi tolak ukur ketahanan pangan adalah pemanfaatan makanan. Pemanfaatan makanan ini mengacu pada bagaimana tubuh seseorang menyerap nutrisi dari makanan tersebut dan menjadikan makanan tersebut sebagai energi. Energi dan asupan nutrisi yang cukup adalah hasil dari perawatan yang baik, persiapan makanan yang baik, dan distribusi makanan yang baik. (NCAER, Tanpa tahun).

India menjadi negara di mana balita usia di bawah 5 tahun memiliki berat badan di bawah rata-rata. Sebanyak 46% dari anak-anak usia di bawah umur memiliki badan kurus atau

kekurangan gizi. Serta kebanyakan wanita di India sebesar 55,3% mengalami anemia yang diakibatkan karena kekurangan pangan. Inflasi harga pangan yang tinggi, juga menjadi salah satu alasan meningkatnya gizi buruk. (NCAER, Tanpa tahun). Hal tersebut menunjukkan bahwa India belum bisa memenuhi kecukupan nutrisi dengan semaksimal mungkin. Kecukupan nutrisi ini seharusnya bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat dan tidak ada perbedaan makanan untuk laki-laki maupun perempuan, baik dari jumlah makanan maupun jenis makanan. Jika dilihat dari kenyataan tersebut, masih sangat sulit bagi India memenuhi ketahanan pangan negaranya. Tentu harus ada perbaikan di segala aspek untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat India dan mengurangi kerawanan pangan.

Alasan India bersedia meratifikasi Paket Bali sendiri adalah karena dalam KTM WTO ke-9 tersebut subsidi untuk pertanian tidak jadi dihapuskan. Pada awal pertemuan, negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada menginginkan subsidi untuk pertanian dihapuskan, namun India menolak hal tersebut, dan mengancam tidak akan meratifikasi Paket Bali apabila subsidi untuk pertanian dihapuskan. India sendiri menginginkan subsidi untuk pertanian tidak dihapuskan, dan menginginkan penambahan subsidi dalam bidang pertanian. Akhirnya setelah terjadi *lobby* antara India dan negara-negara maju, kesepakatan yang dihasilkan adalah penambahan subsidi pertanian dari 10% menjadi 15% dari total produksi nasional selama 4 tahun. Pemerintah

India menginginkan subsidi tersebut diberlakukan secara permanen, namun negara-negara maju keberatan, sehingga India hanya diberi batasan waktu selama 4 tahun. India sendiri melakukan hal tersebut dengan alasan ketahanan pangan, karena apabila petani di India tidak mendapatkan subsidi pertanian dikhawatirkan hal tersebut akan mempengaruhi ketahanan pangan negara India.

Kesimpulan

Terdapat dua alasan mengapa India bersedia meratifikasi Paket Bali. Alasan pertama Pemerintah India bersedia meratifikasi Paket Bali dilandasi oleh kondisi masyarakat India yang sangat membutuhkan subsidi dalam bidang pertanian terkait dengan tujuan keamanan pangan. Keamanan pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi manusia untuk terus bisa bertahan dan melanjutkan kehidupan mereka. Sebagian besar masyarakat India bermatapencaharian sebagai petani dan kebutuhan pangan masyarakat India sebagaimana besar juga berasal dari produksi pertanian mereka.

Pemerintah India melihat kondisi masyarakat (khususnya petani) masih sangat membutuhkan subsidi dalam bidang pertanian. Subsidi dalam bidang pertanian di India merupakan salah satu subsidi yang paling tinggi. Subsidi dalam bidang pertanian ini diberikan dalam bentuk subsidi untuk pupuk, irigasi, dan listrik (sebagai tenaga untuk irigasi). Dalam KTM WTO ke-9 di Bali, India pada awal pertemuan menolak untuk meratifikasi Paket Bali karena isi dari Paket Bali hanya akan menguntungkan negara-negara maju. Dalam KTM

tersebut India mengajukan proposal yang biasa disebut dengan Proposal G33. Dalam proposal tersebut India menginginkan subsidi untuk bidang pertanian ditambah dari 10% menjadi 15% dan tanpa batasan waktu. Sedangkan negara-negara maju menginginkan subsidi untuk pertanian dihapuskan. Setelah mengalami *deadlock* karena tidak ada kesepakatan antara negara maju dan negara berkembang, akhirnya negara-negara maju bersedia menyetujui permintaan India untuk menaikkan subsidi dalam bidang pertanian menjadi 15%, namun hanya dalam kurun waktu 4 tahun.

Alasan kedua Pemerintah India bersedia meratifikasi Paket Bali adalah terkait dengan ketahanan pangan masyarakat India. Jumlah penduduk India yang banyak membuat Pemerintah India harus melakukan berbagai cara untuk bisa menjamin ketahanan pangan masyarakatnya, termasuk menyuarakan pendapat mereka di forum internasional. Ketahanan pangan di India sangat terkait dengan jumlah produksi pertanian mereka. Pertanian dan ketahanan pangan memiliki hubungan yang sangat erat. Karena dari hasil produksi pertanian tersebut, masyarakat India bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka. Oleh karena itu, para petani di India masih sangat membutuhkan subsidi dalam bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan petani di India. Apabila kebutuhan petani terpenuhi, maka produksi pertanian juga akan meningkat dan bisa menjamin ketahanan pangan masyarakat India.

Daftar Pustaka

Buku:

- FAO. 2008. *An Introduction to The Basic Concept of Food Security*. Roma: EC - FAO Food Security Programme.
- FAO. 2013. *FAO Statistical Year Book 2013*. Roma: Food and Agriculture Organization of The united Nation.
- Hara, Abubakar Eby. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri Dari Realisme sampai Konstruktivisme* Bandung: Nuansa Cendekia.

Working Paper:

NCAER (National Council of Applied Economic Research). "India's Food Security Conundrum". Parisila Bhawan. 11, I.P Estate. New Delhi. *A Research Paper Prepared Under The Project Agricultural Outlook and Situation Analysis Reports*.

diakses dari http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/mc9sum_07dec13_e.htm 4 November 2014.

WTO. Tanpa tahun. "Ministerial Conference", diakses dari http://www.wto.org/english/thewto_e/mini_st_e/minist_e.htm 4 November 2014.

Internet:

DFPDI (Dept. of Food & Public Distribution of India). Tanpa Tahun. *Targeted Public Distribution System*, diakses dari <http://dfpd.nic.in/?q=node/101> 12 April 2015.

FAO. Tanpa tahun. *India*, diakses dari <http://faostat3.fao.org/download/FB/FBS/E> 12 April 2015.

Focus Web. *India G-33 Proposal on Food Security: a wrong move can jeopardize India's food security forever*, diakses dari <http://focusweb.org/content/india-g-33-proposal-food-security-wrong-move-can-jeopardize-india%E2%80%99s-food-security-forever> 8 November 2014.

GS (Global Sherpa). Tanpa Tahun. *India-Country Profile, Facts, News, and Original Artikel*, diakses dari: <http://www.globalsherpa.org/india> 5 November 2014.

Pemerintah India. Tanpa tahun. *Agriculture*, diakses dari <http://india.gov.in/topics/agriculture> 5 November 2014.

Pemerintah India. Tanpa tahun. *Detailed Profile: Shri Anand Sharma*, diakses dari <http://www.archive.india.gov.in/govt/rajy/asabhampbiodata.php?mpcode=431> 16 Juni 2015

Tim Redaksi. 2003. *What's the agreement on agriculture*, diakses dari 6 Januari 2015 http://articles.economictimes.indiatimes.com/2003-09-08/news/27528002_1_amber-box-volume-of-export-subsidies-domestic-support015.

WTO. Tanpa tahun. *Days 3, 4 and 5: Round-the-clock Consultation Produce Bao Package*,